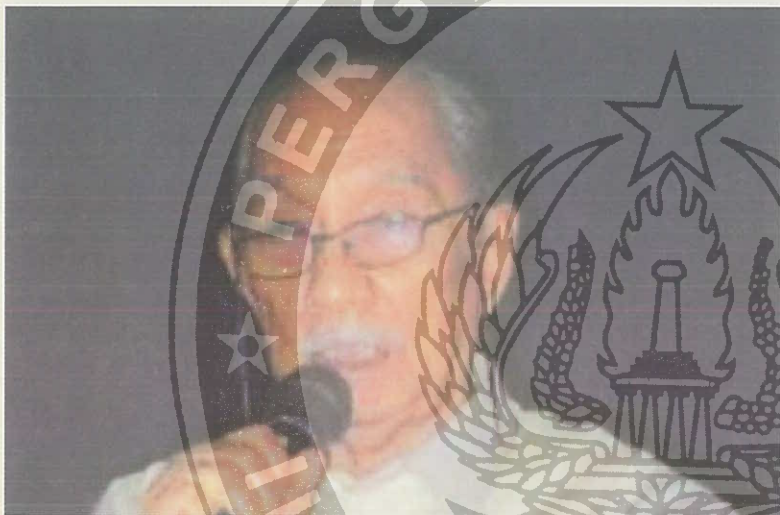


MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

Oleh : Prof. DR. Satjipto Rahardjo



Saya kira tidak ada masalah lagi begitu penting bagi Polri dan sekaligus juga begitu berat untuk diwujudkan daripada kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menjaga kepercayaan tersebut mungkin akan merupakan “tugas abadi” bagi Polri. Tanpa mandat kepercayaan dari masyarakat, Polri akan menghadapi banyak kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Mandat dari rakyat tersebut adalah jauh lebih berharga daripada mandat yang diberikan oleh hukum. Tulisan ini membahas beberapa masalah yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas.

Pekerjaan Polri sangat dilematis, karena di satu pihak ia harus melindungi dan melayani masyarakat dan pada waktu yang sama “mengiris ke dalam daging masyarakat sendiri”. Melindungi dan melayani masyarakat adalah pekerjaan mulia, suatu officium nobile. Namun demikian, itu menjadi sulit dimengerti, bahwa Polisi diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan, bahkan menembak sekalipun terhadap obyek yang harus dilindunginya itu.

Di sini ada sebuah kontradiksi, dimana Polisi menganggap penggunaan kekerasan itu sebagai bagian dari pekerjaannya, sedang rakyat menganggapnya sebagai kekecualian. Suasana kontradiktif ini akan terus

membayangi Polri dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Merebut kepercayaan masyarakat sama sekali tak dapat dilepaskan dari atmosfer kontradiktif tersebut.

Pelajaran yang dapat ditarik dari suasana yang melingkupi pekerjaan Polisi adalah, bahwa ia harus menjalankan pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian. Mengandalkan kekerasan adalah sangat keliru. Kekeliruan itu di perparah oleh potret kerja Polisi sekarang oleh berbagai tindakan kekerasan yang berakibat fatal.

Diakui sekali, bahwa pekerjaan Polisi itu penuh dengan jalan yang licin. Polisi tergoda untuk menggunakan kekerasan, oleh karena menganggap, bahwa dengan demikian pekerjaannya dapat diselesaikan dengan mudah. Lebih daripada itu

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menjaga kepercayaan tersebut mungkin akan merupakan “tugas abadi” bagi Polri

Polisi merasa, bahwa hukum ada di belakangnya. Hukum itu memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan sebagai sesuatu yang sah.

Maka menjadi sangat penting kemampuan mengendalikan diri oleh para personel kepolisian. Kemampuan tersebut sebaiknya menjadi syarat penting untuk menjadi seorang Polisi. Oleh karena itu sejak penerimaan atau rekrutmen tenaga Polri, sejak awal sudah harus dideteksi orang-orang yang kemampuan pengendalian dirinya rendah dan mereka itu sebaiknya tidak diterima.

Dunia perpolisian dewasa ini sudah meninggalkan penggunaan kekerasan dan pemaksaan sebagian senjata Polisi. Sejak tahun 1980-an sudah diperkenalkan apa yang ingin saya sebut sebagai *"soft policing"*. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Polri.

Disini polisi lebih mengandalkan pada komunikasi dengan masyarakatnya, yaitu *"shaking hands with the community"*

Masyarakat dan rakyat malah dapat kehilangan kepercayaan terhadap Polri. Mereka akan takut terhadap Polisi dan sedapat mungkin menghindarinya. Ini sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Seharusnya rakyat datang kepada dan mencari Polisi apabila menghadapi masalah.

Perpolisian yang lembut itu sudah dicoba untuk dijabarkan ke



Komunikasi dua arah antara Polisi dengan masyarakat turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri

dalam berbagai teori dan konsep perpolisian, seperti *"problem solving policing"*, *"community policing"* dan lain-lain. Di sini Polisi lebih mengandalkan pada komunikasi dengan masyarakatnya, yaitu *"shaking hands with the community"*. Cara ini memang sangat berat untuk dijalankan, oleh karena membutuhkan kesabaran cukup besar dan kecintaan terhadap masyarakatnya. Penggunaan kekerasan tidak lagi bersifat fungsional, melainkan suatu kekecualian (exception).

Dari sini muncul pentingnya pendidikan Polisi sebagai pabrik untuk memproduksi Polisi yang siap untuk menjalankan atau mempraktekkan *"soft policing"* atau *"humane policing"* itu. Perpolisian yang demikian itu dapat disebut sebagai perpolisian yang protagonis, bukan antagonis. Dalam perpolisian protagonis, maka posisi Polisi ada di pihak rakyat. Kendatipun pada suatu saat ia harus menindak rakyat, tetapi itu dilakukannya dengan perasaan cinta. Hasil dari perpolisian yang demikian itu akan sangat berbeda daripada perpolisian yang antagonis.

Pendidikan Polri akan mengubah paradigmanya menjadi *"menyayangi"* dari pada sebelumnya, yaitu *"mengandalkan kekuatan"*. Jangan lagi ada Polisi yang tahunya hanya menempeleng rakyat, seperti pengakuan seorang mahasiswa PTIK kepada saya. Sebelum masuk PTIK mahasiswa tersebut sudah praktek di lapangan dan di situ ia sering menggunakan tanganya untuk *"melayani dan melindungi"* rakyat. Baru sesudah beberapa lama bertugas di lapangan ia menyadari, bahwa cara seperti itu tidak benar. Jadi, mahasiswa itu belajar menjadi Polisi yang sebenarnya (*genuine*) di lapangan dan bukan di lembaga yang telah mendidiknya.

Banyak masalah yang dihadapi oleh Polri, tetapi pada hemat saya, yang paling mendesak sekarang ini adalah bagaimana merebut kepercayaan masyarakat atau rakyat. Itu tak dapat dilakukan dengan menggunakan dan memamerkan kekuatan (*power, force*) melainkan senyum, menyayangi dan memelihara komunikasi (*shaking hands*) dengan rakyat dimana ia bertugas.***